

## ***The Role Of Local Government In Human Resource Development And Local Community Empowerment As A Strategy To Improve Economic Sustainability***

### **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Meningkatkan Ekonomi Keberlanjutan**

**Yuliana O Moiwend<sup>1</sup>, Anang Kistyanto<sup>2</sup>, DewieTri Wijayanti Wardoyo<sup>3</sup>**

Program Studi S2 Manajemen, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya<sup>1,2,3</sup>  
[olivamoiwend@gmail.com](mailto:olivamoiwend@gmail.com)<sup>1</sup>, [anangkistyanto@unesa.ac.id](mailto:anangkistyanto@unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [dewiewijayanti@unesa.ac.id](mailto:dewiewijayanti@unesa.ac.id)<sup>3</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*This study analyzes the strategic role of the Merauke Regency Government in promoting a sustainable economy through human resource development and local community empowerment. As a region projected to become a national food barn, Merauke possesses abundant natural resource potential, but its utilization still faces challenges such as limited human resource quality, geographical barriers, and uneven accessibility in remote areas. Using a qualitative approach and case study methods, this study reveals that the local government plays a vital role as a regulator, facilitator, and catalyst in integrating agribusiness technical training and institutional capacity building into regional development planning. Intervention programs include formal education, productive skills training, and community empowerment. and MSME mentoring designed to shift the mindset of communities from aid recipients to independent economic actors. Despite positive progress in increasing community income and competency, policy effectiveness is often hampered by weak cross-agency coordination, budget constraints, and the need to synchronize training curricula with the local wisdom of indigenous communities. The research emphasizes that the success of a sustainable economy in Merauke depends heavily on consistent synergy between strengthening human capital and a participatory empowerment approach. Therefore, strong leadership and inclusive governance are needed to ensure that local communities are not merely objects of development but key actors in managing competitive and sustainable regional potential.*

**Keywords:** Local Government, Human Resource Development, Community Empowerment, Sustainable Economy, Merauke Regency.

#### **ABSTRACT**

Penelitian ini menganalisis peran strategis Pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendorong ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai wilayah yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional, Merauke memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kualitas SDM, hambatan geografis, dan aksesibilitas yang belum merata di wilayah terpencil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi vital sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mengintegrasikan pelatihan teknis agribisnis serta penguatan kapasitas kelembagaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Program intervensi yang dilakukan mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan produktif, dan pendampingan UMKM yang dirancang untuk mengubah pola pikir masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi mandiri. Meskipun terdapat progres positif dalam peningkatan pendapatan dan kompetensi masyarakat, efektivitas kebijakan masih sering terbentur oleh lemahnya koordinasi lintas instansi, keterbatasan anggaran, serta perlunya sinkronisasi kurikulum pelatihan dengan kearifan lokal masyarakat adat. Hasil penelitian menekankan bahwa keberhasilan ekonomi berkelanjutan di Merauke sangat bergantung pada sinergi yang konsisten antara penguatan modal manusia (human capital) dengan pendekatan pemberdayaan yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang inklusif untuk memastikan

bahwa masyarakat lokal bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan aktor utama dalam pengelolaan potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Berkelanjutan, Kabupaten Merauke.

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Merauke sebagai bagian integral dari wilayah strategis di Provinsi Papua Selatan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, meliputi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas lokal yang bertumpu pada karakteristik sosial dan kearifan lokal masyarakat setempat (Sabaru, N., Bedriati Ibrahim, 2023). Potensi tersebut memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya dan kearifan lokal melalui pengelolaan yang dilaksanakan secara terpadu, melibatkan partisipasi aktif, serta berorientasi pada keberlanjutan, dengan mengacu pada paradigma sustainable development yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi Brundtland; WCED (1987) local governance theory, pemerintah daerah dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki otoritas strategis untuk mengarahkan pembangunan agar selaras dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah melalui perumusan kebijakan yang adaptif dan inklusif. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini menjadi agenda strategis, khususnya bagi masyarakat lokal yang bermukim di wilayah kampung-kampung terpencil, karena pembangunan yang berkelanjutan menuntut keterlibatan menempatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai penerima kebijakan (Syahrudin, 2018; Pranaka, 2021).

Dalam perspektif konseptual, pendekatan ini selaras dengan community empowerment theory yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk memperoleh kontrol, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam pembangunan (Nabilla Fada, 2022). Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang inklusif mampu memperkuat aspek sosial budaya, engembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi serta memperkuat daya saing lokal. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat berperan strategis dalam mendorong terbentuknya ketahanan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif (Nabilla Fada, 2022). Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada fungsi regulatif, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan daerah, tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dengan konteks wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang beragam, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Potensi lahan pertanian yang sangat luas dan ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang didorong menjadi lumbung pangan nasional, sehingga menempatkan daerah ini pada posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional (Maghdalena et al., 2023). Dalam kerangka human capital theory, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan ekonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. (Akbar et al., 2024; Scoones, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan lahan yang berkelanjutan hanya akan berdampak optimal apabila diiringi dengan penguatan kualitas

sumber daya manusia serta peran kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan berorientasi jangka panjang (OECD, 2021). Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Merauke tidak hanya menuntut pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal, tetapi juga memerlukan peran strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip *good local governance*, pemberdayaan masyarakat, dan pengintegrasian pengembangan sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah (Maghdalena et al., 2023).

Terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Merauke serta peran strategisnya dalam pembangunan regional, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan masih memerlukan perhatian serius. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional, temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi daerah masih menghadapi keterbatasan dalam aspek efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, yang berdampak pada belum meratanya manfaat pembangunan.

Penelitian Scoones (2021) menegaskan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan hambatan mendasar dalam proses transformasi ekonomi di wilayah tertinggal. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan bahwa “unequal access to productive resources and limited human capacities constrain the ability of local communities to transform their assets into sustainable livelihoods”. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, teknologi, dan informasi serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia membatasi kemampuan masyarakat lokal dalam mengonversi potensi yang dimiliki menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Akibatnya, potensi lokal tidak berkembang secara optimal dan cenderung dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki akses dan kapasitas lebih besar.

Dalam konteks wilayah tertinggal seperti Kabupaten Merauke, temuan tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan komunitas adat. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berisiko bersifat eksklusif dan tidak berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sabaru et al., (2023) menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, sarana produksi, dan layanan pendukung ekonomi, menjadi kendala utama dalam mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efisiensi distribusi hasil produksi serta terbatasnya peluang masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Kondisi ini semakin memperlemah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia di wilayahnya. Selanjutnya, Latupeirissa et al., (2025) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas masyarakat, baik dari aspek keterampilan, pengetahuan, maupun akses terhadap modal dan pasar, memperbesar ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Ketimpangan tersebut menyebabkan manfaat pembangunan cenderung terakumulasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal dan komunitas adat belum sepenuhnya merasakan dampak positif pembangunan secara merata. Dengan demikian, besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Merauke tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai serta penguatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh tantangan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator kinerja pelayanan publik yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan di Kabupaten

Merauke cenderung stagnan, khususnya pada aspek kecepatan layanan, kepastian waktu, dan akuntabilitas (BAPPEDA, 2013). Sementara pelayanan di tingkat distrik dan kampung masih mengalami kendala dalam ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan penerapan sistem kerja berbasis digital yang belum merata. Selain itu, rendahnya capaian reformasi birokrasi, lemahnya budaya kerja kolaboratif antarperangkat daerah, serta belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Lemahnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dapat menghambat efektivitas kebijakan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kondisi tersebut diperparah oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang belum sepenuhnya didukung oleh basis data yang komprehensif dan andal, serta keterbatasan transparansi informasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang belum dipublikasikan secara terbuka dan real-time. Dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan, baik dari aspek sumber daya manusia, cakupan pengawasan, maupun efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di sisi perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan daerah belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta belum terintegrasinya secara optimal antara dokumen perencanaan jangka menengah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja tahunan.

Permasalahan tata kelola tersebut pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya daya saing daerah, belum tercapainya indikator minimal pelayanan dasar pada sejumlah urusan pemerintahan, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada pengembangan potensi lokal. Pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh sinergi kualitas sumber daya manusia, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat secara partisipatif dan inklusif (Prasasti, P. F., & Ma'ruf, 2025). Oleh karena itu, kondisi Kabupaten Merauke menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji secara mendalam kontribusi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai strategi utama dalam mendorong keberlanjutan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan serta karakteristik sosial budaya masyarakat lokal. Dalam perspektif governance theory, pemerintah daerah dipandang sebagai aktor utama yang berperan mengoordinasikan berbagai kepentingan dan sumber daya melalui kebijakan publik yang responsif, transparan, dan inklusif guna mencapai tujuan pembangunan daerah (Milen, 2020). Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan, yang secara bersama-sama menentukan efektivitas peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat lokal (Prasasti, P. F., & Ma'ruf, 2025).

Sebagai regulator, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan dan regulasi agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka human capital theory, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat sebagai unsur fundamental dalam mengakselerasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Melnyk et al., 2020). Sementara itu, dalam peran sebagai fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan teknis dan finansial yang memungkinkan masyarakat mengakses peluang ekonomi dan meningkatkan kapasitas dirinya secara berkelanjutan.

peran pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sejalan dengan community empowerment theory yang menekankan pentingnya peningkatan kontrol dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Zimmerman, 2000). Melalui penciptaan sinergi antara masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, pemerintah daerah berkontribusi dalam memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sekaligus mendorong terciptanya ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah (Jamal, A. C., & Gordon, 2024).

Sejalan dengan agenda nasional, pembangunan ekonomi berkelanjutan terus didorong sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan (Tanjung et al., 2025). Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan serta memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dalam konteks daerah, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta memberdayakan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan.

Di Kabupaten Merauke, masyarakat lokal memiliki berbagai bentuk kearifan lokal dan praktik ekonomi tradisional yang potensial untuk dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif (Pecamuya, 2025). Namun, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, informasi, serta pendampingan menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal sering kali masih bersifat administratif dan proyek-oriented, belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan kapasitas jangka panjang (Latupeirissa et al., 2025). Program pemberdayaan yang dilaksanakan cenderung berfokus pada penyaluran bantuan, tanpa diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan dan evaluasi yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat keberlanjutan program dan minimnya dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah daerah dengan implementasi di lapangan (Yod & Lekatompeppy, 2025). Implementasi kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat seringkali tidak mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal sehingga kebijakan yang ada tidak menjawab permasalahan nyata. Sering dihadapi masyarakat, yang berakibat pembangunan ekonomi berkelanjutan sulit di capai secara optimal (Nathan, 2025).

Penelitian yang serupa di teliti oleh Kebubun (2025), tentang lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan rencana pembangunan. Kurangnya sinergi antar sektor menyebabkan program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Padahal, pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai pihak dan sektor secara simultan. Namun dalam praktiknya, peran strategis pemerintah daerah dalam pengembangan SDM sering kali belum berjalan secara optimal (Syahrudin, 2018). Program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan masih bersifat sektoral, jangka pendek, dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi ekonomi lokal. Akibatnya, pengembangan Sumberdaya manusia yang dilakukan belum mampu menciptakan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Evarista et al., 1945). Selain pengembangan Sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal merupakan elemen

penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat (Arsawan & Sukarta, 2016). Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan, kemandirian, dan daya saing dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi, serta membangun rasa memiliki terhadap proses dan hasil pembangunan.

Suryanto dan Marwansyah Lapinskienė (2025) menemukan bahwa kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan adaptif tenaga kerja terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi daerah tidak hanya tergantung pada investasi fisik, tetapi juga pada kebijakan yang memperkuat kualitas manusia sebagai aset utama pembangunan. Penelitian oleh Prabowo & Rusfiana (2023) dalam *Community Development Journal* menegaskan bahwa partisipasi komunitas memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kapasitas SDM lokal. Melalui pendekatan berbasis komunitas (*community-based development*), masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi.

Hernita & Idris (2021) menekankan bahwa keberhasilan program pengembangan masyarakat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi aktif Masyarakat membentuk rasa memiliki (*sense of ownership*) yang meningkatkan efektivitas program pelatihan dan pemberdayaan. Pendekatan berbasis partisipasi yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif pada seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan menjadi faktor penting dalam mewujudkan harmoni antara keberlanjutan ekonomi dan upaya pelestarian budaya (Hernita & Idris 2021).

Di sisi lain, Hariram & Sudhakar (2023) menemukan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah dalam proyek pengembangan SDM di wilayah pedesaan Afrika menghasilkan peningkatan signifikan pada kemampuan teknis dan manajerial masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut memperkuat keberlanjutan hasil pembangunan karena masyarakat mampu melanjutkan inisiatif setelah proyek selesai. Studi oleh Fatimah & Hasibuan, (2024) dalam *Journal of Sustainable Development in Africa* menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan Masyarakat dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ketika kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendukung otonomi komunitas dan menyediakan sumber daya, maka efektivitas program pemberdayaan meningkat secara signifikan.

Hariram & Sudhakar (2023), Dalam *Sustainability* juga menekankan bahwa hubungan kolaboratif antara pemerintah lokal dan masyarakat dalam konteks Korea Selatan menjadi kunci keberhasilan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, sementara Masyarakat menjadi motor penggerak inovasi sosial dan ekonomi.

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil serupa, bahwa program pemberdayaan berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan inkubasi usaha) berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga serta ketahanan ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai strategi peningkatan ekonomi berkelanjutan. Kajian ini penting untuk mengungkap praktik, dinamika, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam realitas sosial,

kebijakan, dan praktik pembangunan yang terjadi di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif studi kasus dianggap tepat untuk memahami fenomena peran pemerintah daerah secara kontekstual, komprehensif, dan holistik, sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan pengembangan Sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan rekomendasi yang relevan bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Merauke (Kambuam, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pembangunan daerah dan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga memiliki nilai praktis dan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Peran Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah merupakan manifestasi dari fungsi, peran, dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada pemerintahan di tingkat lokal dalam mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan urusan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan serta konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Berdasarkan kerangka teori negara dan desentralisasi, pemerintah daerah berperan sebagai institusi yang memperoleh legitimasi demokratis dari masyarakat lokal untuk menyelenggarakan pelayanan publik, merumuskan kebijakan, serta mengelola sumber daya daerah guna mencapai kesejahteraan bersama. Peran tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai mediator sentral dalam rangka menjembatani negara dan masyarakat dengan melaksanakan pemerintahan yang responsif serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Sesuai prinsip kewenangan, perannya tidak terbatas menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan mengambil peran pemerintahan yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif *governance*, pemerintah daerah berperan sebagai penggerak tata kelola publik yang melibatkan interaksi kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah untuk pengelolaan urusan publik (Kooiman, 2003). Dengan demikian, pemerintah daerah mengambil peran antara lain sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator pembangunan. Pemikiran tersebut diperkuat oleh (Putnam, 1995) yang menekankan bahwa efektivitas kinerja pemerintahan dinilai melalui institusi lokal dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tercermin melalui modal sosial (kepercayaan, partisipasi warga, dan jejaring sosial).

Melalui teori peran pemerintahan memandang pemerintahan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan perumusan kebijakan publik. Hal ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan (*public service provider*) dan perumus kebijakan (*public policy maker*) yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Pandangan tersebut dipertegas yang mengklasifikasikan tiga peranan utama: pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berakar pada teori negara kesejahteraan (*welfare state theory*). Dalam kerangka aturan kebijakan publik, menyatakan bahwa pelaksanaan peran ini harus selalu berlandaskan pada kewenangan dan aturan tanggung jawab institusional yang jelas. Seiring perkembangan teori tata kelola

modern, memperkenalkan konsep *local governance network*, di mana peran pemerintah daerah bergeser dari pendekatan *government* menuju *governance*, bertindak sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam jejaring aktor pembangunan lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, Nabilla Fada (2022) menegaskan bahwa peran pembangunan ekonomi mencakup penyediaan infrastruktur, regulasi adaptif, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Terakhir, menegaskan secara normatif bahwa hakikat utama pemerintahan terletak pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk dilayani, yang mengandung dimensi etis terhadap keadilan sosial dan akuntabilitas.

## 2. Dimensi Peran Pemerintah Daerah

Dimensi fungsional pemerintah lokal mencakup aspek-aspek esensial yang membedah karakter, jangkauan tanggung jawab, serta orientasi tindakan birokrasi daerah. Secara konseptual, pemahaman mengenai intervensi pemerintah berakar kuat pada paradigma ekonomi klasik Adam Smith, di mana negara didudukkan sebagai entitas vital dalam menciptakan prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi melalui tiga fungsi: menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta menyediakan barang publik.

### a. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator:

Merupakan bentuk kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan mengatur kebijakan serta peraturan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah daerah bukan hanya pembuat aturan, tetapi pemegang otoritas yang menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal (Maulida & Haryati, 2023). Ini mencakup penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan teknis yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator:

Merujuk pada fungsi pemerintah dalam menggerakkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah berperan sebagai pemersatu dan penggerak dinamika sosial agar masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan (Hesti & Johari, 2025; Simamora, 2023). Hal ini dilakukan melalui bimbingan, pendampingan, dan dialog yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif serta rasa memiliki (*ownership*) terhadap program pembangunan.

### c. Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator dan Koordinator Pembangunan:

Merupakan dimensi strategis dalam menghubungkan berbagai aktor pembangunan (masyarakat, swasta, akademisi) untuk menciptakan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah bertindak sebagai jembatan untuk memastikan pembangunan berjalan terpadu, inklusif, dan tidak tumpang tindih. Pendekatan ini menekankan kolaborasi dan *governance* lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi kompleksitas tantangan lokal yang tidak bisa diselesaikan aktor tunggal (Almeida, 2024).

## 3. Tujuan Peran Pemerintah Daerah

Tujuan peran pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Delegasi kekuasaan melalui desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan publik, mendorong responsivitas kebijakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui kebijakan regional yang kontekstual (Dawud, 2023). Salah satu tujuan krusial adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada



kepuasan pengguna jasa dan akuntabilitas (Tanjung & Pohan, 2024). Selain itu, tujuan lainnya adalah mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian akses informasi agar masyarakat memiliki kompetensi dan kreativitas dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal.

## **b. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi atau masyarakat, serta penyediaan jalur karier yang didukung oleh fleksibilitas organisasi. Secara luas, ini adalah proses peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja, baik pada skala makro maupun mikro (Becker, 1964). Pengembangan SDM modern mencakup kompetensi interpersonal, kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis yang relevan dengan transformasi lingkungan kerja, yang terbukti signifikan terhadap peningkatan kinerja dan kreativitas.

### **2. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengembangan SDM dirancang secara sistematis untuk memperkuat modal manusia (*human capital*) sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan organisasi maupun pembangunan sosial-ekonomi (Fian Arifiona Faradila & Sopiah Sopiah, 2023). Konsep ini menempatkan pengembangan sebagai investasi strategis melalui pembelajaran terencana guna menyiapkan individu menghadapi peran masa depan. Selain itu, pengembangan SDM mencakup penguatan kapasitas partisipatif dan pembentukan budaya pembelajaran berkesinambungan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Muhani & Nurmala, 2024). Program pengembangan harus diselaraskan dengan strategi kebijakan publik dan kebutuhan pasar kerja serta integrasi teknologi digital (Siti Dena Zahar et al., 2023).

### **3. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Tujuan utama adalah meningkatkan kemampuan agar mampu mengoptimalisasi peran individu dalam mencapai target strategis kolektif melalui intervensi edukatif. Hal ini bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang profesional, fleksibel, dan inovatif guna meningkatkan produktivitas serta kualitas output masyarakat. Individu yang dikembangkan secara sistematis diharapkan memiliki kapasitas analisis kritis dan resolusi masalah multidimensional (Rizki Adilla Fatah et al., 2024). Secara strategis, pengembangan SDM berfungsi memperkuat struktur kompetensi organisasi agar adaptif terhadap tuntutan tugas yang lebih kompleks dan menciptakan lingkungan *lifelong learning* (Septian & Tahier, 2024).

### **4. Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Metode pengembangan SDM merupakan pendekatan sistematis yang digunakan organisasi atau pemerintah dalam memperkuat kompetensi sumber daya:

- a. Pelatihan (*Training*) dan Pendidikan Formal: Diarahkan untuk memperluas pengetahuan serta keterampilan teknis secara langsung melalui *workshop*, *on-the-job training*, simulasi, dan teknologi interaktif guna meningkatkan kapasitas adaptif karyawan.
- b. Coaching dan Mentoring: Di mana individu mendapatkan pembinaan langsung dari pemimpin atau mentor berpengalaman. *Coaching* berfokus pada keterampilan kerja dan masalah operasional, sementara *mentoring* lebih pada pembentukan karier jangka panjang serta penguatan nilai dan perilaku profesional.

## **3. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Merauke. Melalui kacamata kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terkait strategi peningkatan ekonomi berkelanjutan serta mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan secara komprehensif.

Referensinya merujuk pada Creswell (2014), di mana penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif aktor yang terlibat langsung. Selanjutnya, Yin (2018) menjelaskan bahwa metode studi kasus sangat tepat untuk mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas. Dalam konteks Merauke, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap dinamika kolaboratif, nilai-nilai budaya (seperti gotong royong dan kepemimpinan tradisional), serta hambatan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan.

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Strategi ini dipilih karena penelitian memusatkan perhatian pada satu wilayah tertentu, yaitu Kabupaten Merauke, sebagai konteks empiris. Sifat deskriptif-eksploratif bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan SDM dan pemberdayaan masyarakat dirancang serta diimplementasikan, serta bagaimana dinamika interaksi antaraktor pembangunan membentuk upaya pencapaian ekonomi berkelanjutan.

**Lokasi Dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian: Dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, mencakup 22 Distrik yang terdiri dari kawasan perkotaan hingga wilayah adat perdesaan. Fokus lokasi ini memungkinkan analisis terhadap masyarakat lokal dan pendatang yang bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan hutan sagu.
- b. Waktu Penelitian: Pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, terhitung mulai Oktober hingga Desember 2025. Periode ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data primer di lapangan hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan.

**Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Total subjek berjumlah 20 orang, yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Informan Kunci (10 Orang): Meliputi pengambil kebijakan dan pakar, yaitu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten II Setda, Kepala Dinas PMK, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perempuan dan Anak, Pejabat Dinas Perindakop, Pejabat Dinas Tata Kota/LH, dan Akademisi.
- b. Informan Utama (10 Orang): Meliputi aktor lapangan dan penerima manfaat, yaitu Ketua Komunitas (Malid Iwag dan Ngaulam Alamia), Pelaku Pelatihan SDM, Pelaku UMKM, serta Tokoh Masyarakat Lokal.

No	Subjek/	Jabatan /Posisi	Fokus Informasi	Jumlah	Teknik Pengumpulan
----	---------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

Informan			Data		
1.	Bupati/ Wakil Bupati	Kepala Daerah	visi, kebijakan strategis, arah pembangunan daerah	1 org	Wawancara mendalam
2	Sekretaris Daerah (Sekda )	Pimpinan Administrasi Pemerintah Daerah	Koordinasi kebijakan lintas OPD dan implementasi program pembangunan daerah	1 org	Wawancara mendalam
3	Asisten II Setda	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sinkronisasi program ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan SDM	1 org	Wawancara mendalam
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak	Pimpinan OPD	Kebijakan pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga	1 org	Wawancara mendalam
5.	Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung ( PMK)	Pimpinan OPD	Program pemberdayaan masyarakat kampung dan pengelolaan ekonomi berbasis komunitas	1 org	Wawancara mendalam
6.	Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Koperasi (Perindakop)	Pejabat Teknis OPD	Pembinaan UMKM, koperasi, dan penguatan ekonomi lokal	2 org	Wawancara mendalam
7.	Pejabat Dinas tata kota dan Lingkungan Hidup	Pejabat Teknis OPD	Penataan ruang, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan	1 org	Wawancara mendalam
8	Akademisi	Dosen /Peneliti	Analisis kebijakan, perspektif ilmiah, dan evaluasi pembangunan ekonomi berkelanjutan	2 org	Wawancara mendalam
Total			10 org		

### Sumber Dan Jenis Data

Data penelitian terdiri dari dua sumber utama:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penentuan informan primer didasarkan pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*), di mana pengumpulan data dihentikan jika informasi telah menunjukkan pola yang berulang.
- b. Data Sekunder: Data yang tidak diperoleh secara langsung dari tindakan subjek, melainkan dari dokumen kebijakan daerah, laporan program (seperti RPJMD), arsip perencanaan pembangunan, serta publikasi akademik yang relevan guna memperkuat temuan data primer.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengembangan SDM dan praktik kebijakan di lapangan. Peneliti terlibat langsung untuk memahami pola komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat serta respons komunitas terhadap program yang dijalankan.
- b. Wawancara: Menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan komunikasi dua arah yang bersifat terbuka. Hal ini memungkinkan informan menyampaikan informasi secara reflektif mengenai pengalaman mereka terkait kebijakan pembangunan dan partisipasi ekonomi.
- c. Studi Dokumentasi: Menelusuri dan mengkaji dokumen resmi, laporan hasil pelatihan, serta kebijakan pembangunan daerah untuk menyediakan data pendukung yang valid dan kontekstual.

#### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama (*the researcher as the key instrument*). Peneliti terlibat aktif dalam seluruh proses penelitian untuk menyesuaikan diri dengan konteks lapangan. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi:

- a. Panduan Wawancara: Daftar pertanyaan semi-terstruktur.
- b. Lembar Observasi: Catatan lapangan (*field notes*) untuk merekam interaksi sosial.
- c. Alat Perekam: *Audio recorder* dan kamera untuk menjaga keutuhan data.
- d. Jurnal Refleksi: Catatan untuk meminimalkan bias dan subjektivitas peneliti.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, di mana analisis diawali dari pengumpulan temuan empiris di lapangan yang kemudian diinterpretasikan menjadi konsep-konsep umum. Proses analisis data bersifat iteratif (berlangsung terus-menerus) dan simultan sejak tahap awal pengumpulan data. Fokusnya adalah mengorganisasi data hasil wawancara dan observasi guna menemukan pola tematik yang menjawab tujuan penelitian secara mendalam dan komprehensif.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Hasil**

##### **1. Peran dan Posisi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pemkab Merauke menjalankan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Strategi pembangunan disesuaikan dengan karakteristik lokal melalui prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Fokus utama diarahkan pada reformasi birokrasi, inovasi layanan, dan perluasan akses hingga wilayah terpencil demi pembangunan berkelanjutan.

## 2. Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDM

Kepemimpinan di Merauke menempatkan SDM sebagai prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Secara teoretis, kepemimpinan transformasional di sini berperan sebagai agen perubahan. Meski komitmen kuat terlihat pada alokasi program, tantangan muncul pada aspek konsistensi, sinergi lintas sektor, serta lemahnya monitoring yang mengakibatkan beberapa program bersifat parsial.

## 3. Kebijakan dan Program Pemerintah Terkait Pengembangan SDM

Kebijakan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah dengan fokus pada pendidikan dan keterampilan teknis. Namun, implementasinya terkendala keterbatasan anggaran dan kurangnya pendampingan lanjutan. Informan menyebutkan bahwa pelatihan seringkali tidak berkelanjutan karena anggaran terbatas dan materi yang terkadang kurang relevan dengan kondisi sosial budaya lokal.

## 4. Bentuk Intervensi: Pelatihan, Pendidikan, Pendampingan, Peningkatan Kapasitas

- a. Pelatihan: Fokus pada keterampilan teknis (pertanian/perikanan) namun cenderung jangka pendek.
- b. Pendidikan: Upaya peningkatan wawasan melalui jalur nonformal untuk mengatasi rendahnya literasi dasar.
- c. Pendampingan: Menjadi aspek krusial namun terbatas karena luasnya wilayah dan kurangnya personil.
- d. Kapasitas Kelembagaan: Penguatan kelompok tani/koperasi yang masih terkendala masalah manajerial.

## 5. Implementasi Program di Tingkat Kampung/Distrik

Distrik berfungsi sebagai penghubung, sementara kampung sebagai pelaksana. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas administrasi aparatur kampung dan tantangan geografis yang berat (sungai dan jalan berlumpur). Keberhasilan di tingkat ini sangat bergantung pada kepemimpinan kepala kampung dan partisipasi masyarakat.

## 6. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah

Masyarakat mengakui adanya upaya pemerintah dalam peningkatan kapasitas, namun memberikan kritik terhadap aspek keberlanjutan. Terdapat harapan agar pemerintah lebih inklusif dengan melibatkan tokoh adat dan agama sejak tahap perencanaan agar program lebih dipercaya dan tepat sasaran.

## 7. Kebijakan dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Konsep Pemberdayaan: Mengadopsi *capacity building* agar masyarakat menjadi subjek pembangunan. Tantangannya adalah kurangnya aspek perlindungan (*protecting*) pasca-pelatihan. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada usaha produktif berbasis potensi lokal. Temuan menunjukkan dampak positif pada peningkatan pendapatan bagi mereka yang mendapat pendampingan pemasaran, namun masih ada kelompok yang berhenti karena kurangnya evaluasi berkelanjutan.

## 8. Hambatan dan Tantangan

Faktor utama yang menghambat adalah keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta kendala geografis yang rumit (akses sungai dan

infrastruktur jalan rusak). Hal ini menyebabkan hasil program belum maksimal di seluruh wilayah.

#### 9. Dampak Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Program terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berhasil mandiri. Testimoni menunjukkan peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi, yang mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang tepat mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.

#### b. Pembahasan

##### 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDM untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Merauke memegang peran sentral sebagai regulator sekaligus akselerator dalam meningkatkan kualitas manusia. Berdasarkan temuan lapangan, peran strategis ini diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan fundamental:

- a. Perencanaan Strategis Berbasis Potensi Lokal: Pemerintah berhasil menyinergikan RPJMD dengan kebutuhan riil masyarakat. Fokus pada sektor agribisnis dan UMKM menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara peningkatan kompetensi dengan kearifan lokal. Hal ini memvalidasi teori *Human Capital Development* bahwa investasi pada manusia adalah kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Akselerasi Melalui Sertifikasi dan Pendidikan: Dengan adanya kenaikan 15% peserta pelatihan, pemerintah membuktikan bahwa akses pendidikan formal dan non-formal kini lebih terbuka. Pemberian beasiswa dan sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang diakui secara profesional.
- c. Pendampingan Lintas Sektor: Melalui kolaborasi antar-dinas (Pendidikan, Koperasi, dan Ketenagakerjaan), pemerintah berperan sebagai katalisator yang mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan memiliki etos kerja tinggi.

##### 2. Sinergi antara Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Keberhasilan di Merauke menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh melalui:

- a. Integrasi Pelatihan dan Unit Usaha: Program tidak berhenti pada pemberian sertifikat, melainkan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok usaha. Integrasi ini memastikan bahwa keterampilan yang didapat langsung dipraktikkan dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga menciptakan keberlanjutan pendapatan.
- b. Penguatan Partisipasi dan Modal Sosial: Pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan menumbuhkan *sense of ownership* (rasa memiliki). Ketika masyarakat merasa memiliki program tersebut, keberlanjutan ekonomi lebih terjamin karena adanya inisiatif internal, bukan sekadar paksaan dari atas (*top-down*).
- c. Penciptaan Efek Multiplikatif Ekonomi: Sinergi ini berhasil memperluas jejaring antara masyarakat, lembaga pelatihan, dan sektor swasta. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan kapasitas kolektif desa dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan *Sustainable Development Theory*.

##### 3. Hambatan dan Kesenjangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat progres positif, penelitian ini mengungkap beberapa tantangan sistemik yang perlu diintervensi lebih lanjut:

- a. Kendala Infrastruktur dan Geografis: Luas wilayah Kabupaten Merauke menjadi tantangan dalam pemerataan akses. Masyarakat di wilayah terpencil seringkali tertinggal dalam mendapatkan informasi dan fasilitas pelatihan karena keterbatasan infrastruktur pendukung.
- b. Kesenjangan Kesiapan Input SDM: Terdapat variasi tingkat pendidikan dasar yang mencolok antarwilayah. Hal ini menyebabkan kurikulum pelatihan yang bersifat modern terkadang sulit diserap secara instan, sehingga memerlukan metode pendampingan yang lebih personal dan durasi yang lebih lama.
- c. Sinkronisasi Kelembagaan: Lemahnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terkadang menyebabkan tumpang tindih program atau adanya "celah" dalam rantai pemberdayaan, di mana masyarakat sudah dilatih namun belum mendapatkan akses permodalan atau pasar secara maksimal.
- d. Adaptasi Sosial-Budaya: Proses transisi dari pola ekonomi tradisional menuju model ekonomi modern produktif sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih fleksibel dan menggunakan pendekatan persuasif agar program pembangunan tetap menghargai identitas budaya setempat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa ekonomi berkelanjutan sangat bergantung pada peran sentral pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinator dalam mensinergikan pengembangan SDM dengan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi lintas OPD yang belum optimal, serta kendala geografis, integrasi antara peningkatan kapasitas individu dan pendekatan partisipatif terbukti mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. SDM yang kompeten menjadi prasyarat keberhasilan program, sementara pemberdayaan memberikan ruang aktualisasi untuk mengelola potensi lokal secara produktif. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan seperti RPJMD, tetapi mutlak memerlukan konsistensi implementasi, kepemimpinan yang kuat, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kesejahteraan nyata di tingkat lokal.

### b. Saran

1. Sinergi Kebijakan dan Integrasi OPD Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyusun kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Diperlukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas pembangunan.
2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Prioritaskan peningkatan kompetensi aparatur dalam tata kelola dan pendampingan masyarakat. Keberlanjutan program harus dijamin melalui anggaran yang konsisten serta sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang berorientasi pada dampak jangka panjang (outcome).
3. Pengembangan SDM Berbasis Potensi Lokal Pendidikan dan pelatihan harus relevan dengan kebutuhan riil pasar dan potensi daerah. Fokus pengembangan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada etos kerja dan kemampuan adaptasi masyarakat agar mampu menjadi subjek pembangunan yang berdaya saing.
4. Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif Tempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui pendekatan yang inklusif. Pemda perlu memperkuat kelembagaan lokal dan

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi.

5. Transformasi Ekonomi Inklusif Dorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan. Hal ini dilakukan melalui penguatan usaha produktif lokal, perluasan akses modal, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta komunitas.
6. Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk mengembangkan penelitian menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods serta memperluas lokus penelitian pada wilayah atau sektor lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih general dan komprehensif.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Y. K., Ariana, S., Setyadi, A., Pawirosumarto, S., & E. E. (2024). "Human capital and sustainable university: Mediating role of sustainable human resource management in Indonesia." *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 182–192. [https://doi.org/https://doi.org/10.21511/ppm.22\(1\).2024.16](https://doi.org/https://doi.org/10.21511/ppm.22(1).2024.16)
- Almeida, F. (2024). The role of partnerships in municipal sustainable development in Portugal. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 16(1), 231–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19463138.2024.2380052>
- Arsawan, I. W. E., Kariati, N. M., & Sukarta, I. W. (2016). Pemberdayaan Berbasis Comunity Development: Studi Eksploratif di Kawasan Wisata Sangeh. *Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 238–248.
- BAPPEDA, T. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang*. [http://www.dof.gov.my/en/c/document\\_library/get\\_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715](http://www.dof.gov.my/en/c/document_library/get_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715)
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.
- Brundtland; WCED. (1987). *Our common future*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Publications.
- Dawud, J. (2023). Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.824>
- Evarista, Y., Rozikin, M., & Domai, T. (1945). PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN DANA DESA (Studi kasus pada Kampung Kondo Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke). *JAP*, 5(4), 317–323.
- Fatimah, Y. A., Govindan, K., Sasongko, N. A., & Hasibuan, Z. A. (2024). The critical success factors for sustainable resource management in circular economy: Assessment of urban mining maturity level. *Journal of Cleaner Production*, 469, 143084. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143084>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainability: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability. *Sustainability*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Hernita, H., Surya, B., Perwira, I., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic Business Sustainability and Strengthening Human Resource Capacity Based on Increasing the Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Makassar City. *Sustainability*, 13(6), 3177. <https://doi.org/10.3390/su13063177>
- Hesti, D. E. P., Adiansyah, J. S., & Johari, H. I. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dan Organisasi Non-Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan



- Kawasan Perdesaan. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 490–502. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.3873>
- Jamal, A. C., & Gordon, R. (2024). Grappling with governance: Emerging approaches to build community economies. *Journal of Rural Studies*, 107, 103242. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103242>
- Kambuam, W. (2025). Tantangan Dalam Pelayanan Publik Bureaucratic Reform in Merauke : Policy Evaluation and Challenges in Public Service. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 11357–11367.
- Kebubun, R. J. M. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Studi Kasus Di Daerah Tertinggal Implementation of Community Economic Empowerment Program : Case Study in Underdeveloped Area. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 11384–11395.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Erasmus University.
- Lapinskienė, G. (2025). Theory and Practice of Sustainable Economic Development. *In Sustainability (Switzerland)*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/su17104670>
- Latupeirissa, F., Tjilen, A. P., Yani, N., Musamus, U., Lokal, S., & Pangan, K. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS POTENSI. 12, 3–12.
- Maghdalena, M., Widiastuti, D., Syaukat, Y., Falatehan, A. F., & Hakim, D. B. (2023). Analyzing the Food Estate Program's Current Status and Future Prospects in Merauke Papua. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(2), 119–133. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v40n2.2022.119-133>
- Maulida, I., Mustofa, A., & Haryati, E. (2023). The role of local government in Reog Ponorogo MSME empowerment: A regulator, facilitator, and catalyst. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(3), 568–580. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i3.29315>
- Melnyk, L., Sommer, H., Kubatko, O., Rabe, M., & Fedyna, S. (2020). The economic and social drivers of renewable energy development in OECD countries. *Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 37–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.04](https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.04)
- Milen, A. (2020). *Konsep Capacity building*. 1–28.
- Muhani, U., Fahrizal, M., & Nurmala, N. (2024). Strategies of resources development in human with accessing the competitive right of the organization. *International Journal of Business, Economics & Management*, 7(1), 35–42. <https://doi.org/10.21744/ijbem.v7n1.2254>
- Nabilla Fada, H. L. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GIRILAYU. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7, 1–19. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2344>
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- OECD. (2021). *The Oecd Human Capital Measurement Framework*. Oecd Publishing.
- Pecamuya, R. (2025). Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 74–80. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374>
- Prabowo, H., Rowa, H., & Rusfiana, Y. (2023). Sustainable Community Development as a Main Motive of Good Governance System and Ethical Presentation in a Developing Nation. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(1), 182–198. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1566>
- Pranaka, R. N. (2021). Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Covid-19 di Kabupaten Mempawah. *In Prosiding University Research Colloquium*, 242–250.
- Prasasti, P. F., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng

- Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 598–614. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15699644>
- Putnam, R. D. (1995). *The Thriving Community, Social Capital, and Public Life. World Economy and International Relations*. 4(77–86). <https://doi.org/10.20542/0131-2227-1995-4-77-86>
- Rizki Adilla Fatah, M., Kuswinaro, M., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & K. (2024). *PT. Media Akademik Publisher PERAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING ORGANISASI SEBUAH STUDI LITERATUR Oleh. Jma*. 2(11), 3031–5220.
- Sabar, N., Bedriati Ibrahim, & B. (2023). Perkembangan Sosial Ekonomi Papua Kabupaten Merauke 2005-2014. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 866–876. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i4.152>
- Scoones, I. (2021). Pastoralists and peasants: perspectives on agrarian change. *Journal of Peasant Studies*, 48(1), 1–47. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1802249>
- Septian, Q., Sahar, M., & Tahier, I. (2024). Tujuan Pengembangan Sdm Pada Setiap Perusahaan. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 498–504. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/2266>
- Simamora, D. F. (2023). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan good governance pemerintahan. *J-Innovative*, 7(2), 1–10.
- Siti Dena Zahar, Filika Millenia, Fitri Amanda Syahria, Muhammad Rizki Maulana, Siti Aisyah Binti Panatik, & I. B. N. (2023). The Role Of Human Resource Development (HRD) In The 5.0 Era. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(1), 58–66. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i1.1221>
- Syahrudin. (2018). Program Kebijakan Pemerintah. *Masyarakat Lokal*, 2, 110–116.
- Tanjung, A. W. S., Harahap, I., & Anggara, W. (2025). Implementation of Islamic economic growth theory in achieving sustainable development in Indonesia. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (INSIS)*, 6(1), 1335–1343.
- Tanjung, K., Batubara, J. S., Siregar, T. K., & Pohan, Z. F. A. (2024). Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(9).
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications: Design And Methods (6th Ed.)*. SAGE Publications.
- Yod, Y., Teturan, Y. E., & Lekatompessy, R. L. (2025). *Paradoks Perlindungan Sosial : Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke*. 8(1), 110–118.
- Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 82–91. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016>